



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IR. HAMKA HENDRA NOER, M.SI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG TRANSFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI
3. NHK : 217524

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.965.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, MAZDA X2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	13.839.000.000
III. HUTANG	Rp.	2.950.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.889.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.